

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA**

Skripsi



Disusun Oleh:

Nur Aziz Prabowo

NIM. 20150610451

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara
2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Aziz Prabowo

Nim : 20150610451

Judul Skripsi : **PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGELOLAAN DANA
OTONOMI KHUSUS PAPUA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 10 Juli 2019



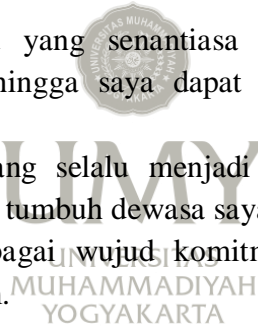
Nur Aziz Prabowo
NIM. 20150610451

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahabbal'amin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kelancaran dan keselamatan bagi hamba-Nya.
2. Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi semua umat manusia.
3. Kedua orangtua saya yang senantiasa memberikan dukungan moral sekaligus spiritual sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan tuntas.
4. Kedua kakak saya yang selalu menjadi dan memberi inspirasi untuk mengarungi perjalanan tumbuh dewasa saya.
5. Diri saya pribadi sebagai wujud komitmen untuk menuntaskan studi menjadi sarjana hukum.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Keluarga besar penulis dan para sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral dan spiritual sehingga memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 10 Juli 2019

Nur Aziz Prabowo
NIM. 20150610451

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dewan Perwakilan Daerah	7
1. Dasar Hukum DPD	10
2. Kewenangan DPD	15
3. Struktur Kelembagaan DPD	17
4. Hubungan DPD dengan Lembaga lain	29
a. Hubungan DPD dengan MPR	30
b. Hubungan DPD dengan DPR	31
c. Hubungan DPD dengan Presiden	31
d. Hubungan DPD dengan BPK	32
e. Hubungan DPD dengan Pemerintah Daerah	32
B. Pemerintah dan Pemerintahan	33
C. Sistem Pemerintahan Daerah	35
1. Dasar hukum Pemerintahan Daerah	35
2. Pengertian Pemerintah Daerah	39
D. Bentuk Pemerintahan Daerah di Indonesia	41
1. Pemerintah Daerah Administratif	41
2. Pemerintah Daerah Otonom	42
E. Asas-Asas Pemerintahan Daerah	48

1. Asas Desentralisasi	49
2. Asas Dekonsentrasi	51
3. Asas Tugas Pembantuan	53
F. Otonomi Daerah di Indonesia	54
G. Desentralisasi Asimetris di Indonesia	57
1. Otonomi Khusus Aceh	58
2. Otonomi Khusus Papua	63
3. Daerah Khusus Ibukota Jakarta	65
4. Daerah Istimewa Yogyakarta	68

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	70
B. Jenis Data	71
C. Teknik Pengumpulan Data	73
D. Analisis Data	73

BAB IV PEMBAHASAN

A. Arah Kebijakan Dana Otonomi Khusus Papua	75
B. Perbandingan Kebijakan antara Dana Otonomi Khusus Papua dengan Dana Otonomi Khusus Aceh	76
C. Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua	81
D. Dana Otonomi Khusus Papua dari Tahun 2002 sampai 2018	83
E. Penggunaan Dana Otonomi Khusus	86
F. Pengawasan DPD terhadap Dana Otonomi Khusus Papua	89
1. Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua	89
2. Proses Pelaksanaan Pengawasan DPD	94
3. Hasil Pengawasan dan Rekomendasi	96
4. Ancaman Korupsi	98
G. Analisis Pengawasan DPD Terhadap Dana Otonomi Khusus	99

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Perbandingan landasan yuridis dan landasan filosofis antara Aceh dengan Papua	76
2. Perbandingan aspek non fiskal dan aspek fiskal antara Aceh dengan Papua	77
3. Perbandingan dasar pengaturan antara Aceh dengan Papua	78
4. Perolehan dana otonomi khusus Papua	83
5. Perolehan dana tambahan infrastruktur Papua.....	84
6. Perolehan dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dan dana bagi hasil minyak-gas Papua	85

DAFTAR GAMBAR

1. Perolehan dana APBD Papua.....	86
2. Arah kebijakan dana otonomi khusus Papua	91
3. Skema implementasi Perdasi dan Perdasus.....	93